

**BANK GARANSI SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA
TERJADI WANPRETASI OLEH NASABAH**

Skripsi



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

OLEH:

LUTFIAH INTANG SULIATI
NIM. 10400114391

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiah Intang Suliati

Nim : 10400114391

Tempat/ Tgl. Lahir : Sinjai/ 15 November 1996

Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Andi Tonro, No. 6 Kab. Gowa.

Judul Skripsi : Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi
Wanprestasi Oleh Nasabah (Studi Pada Kantor Bank BRI Cabang Somba Opu)

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

Penyusun,

LUTFIAH INTANG SULIATI
NIM. 10400114391

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah", yang disusun oleh Lutfiah Intan Suliati, NIM: 10400114391, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 November 2018 M, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Ketatanegaran (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 23 November 2018 M
15 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H	(.....)
Penguji I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: St. Nurjannah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Istiqamah, S.H., M.H	(.....)

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Dr. Darussalam, M. Ag.

016199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan segala nikmat-Nya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa syukur yang tiada terhingga atas segala nikmat serta karunia yang di curahkan kepada penulis.

Salam serta shalawat atas junjungan nabiullah Muhammad SAW. yang telah di berikan amanah oleh allah SWT. untuk menjadi *Uswatun Khasanah* atau contoh tauladan yang baik bagi kita semua ummat-Nya.

Karya ilmiah yang berjudul **“Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah (Studi pada kantor Bank BRI cabang Somba Opu)”** sebagai bukti penyelesaian tugas akhir dan sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar pendidikan strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, baik berupa dukungan materil maupun dukungan moril, baik itu berupa kritik saran maupun motivasi demi kelancaran dalam penyelesaian penyusunan karya ini. Dan terlebih dahulu saya

mengucapkan banyak terima kasih untuk Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Rosmiati yang tak henti-hentinya selalu memberikan dorongan dan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi saya. teruntuk kakanda Muhammad Budyatna Suliati yang selalu memotivasi saya dan membantu saya untuk bisa semangat dalam mengerjakan skripsi.

Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Dr. Hamsir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Dr. Saleh Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Istiqomah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
7. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

8. Dr. Marilang, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi bagi penulis yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis .
9. Istiqamah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan memahami kekurangan penulis untuk bisa membimbing saya .
10. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., selaku Penguji I yang sangat baik memberikan sumbangsi yang cukup besar dalam penulisan materi skripsi.
11. Siti Nurjannah, S.H., M.H., selaku Penguji II yang senantiasa memberikan saran mengenai metode pulisan skripsi.
12. Dosen serta seluruh Staf Jurusan dan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan sumbangsi keilmuan kepada penulis serta bantuan dan kerjasamanya dalam segala urusan terkait.
13. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendukung dalam berbagai proses baik didalam maupun di luar kampus.
14. Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2014 khususnya rekan-rekan kelas Ilmu Hukum H terutama saudaraku Suardi dan saudariku Lia Imah, Ayu, dan Idar yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.
15. Teman-teman mahasiswa KKN Angkatan 57 Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
16. Serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Sekian, sangat besar harapan penulis agar skripsi ini bisa memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, semoga Rahmah dan hidayah Allah SWT. tercurah di dalamnya sehingga dapat memberikan manfaat kepada hamba-hamba-Nya. *Aamin ya Rabbal Aalamin.*

Samata-gowa,

Penyusun,

LUTFIAH INTAN S
NIM. 10400114391



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-20
A. Bank Garansi	11
B. Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian	21
C. Dasar-Dasar Dalam Perjanjian	32
D. Nasabah	33

E. Wanprestasi	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42-48
A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Somba Opu Makassar	42
B. Kasus bank garansi	44
C. Tanggung Jawab Bank Garansi Jika Nasabah tidak Memenuhi Kewajibannya	53
D. Proses Penyelesaian Penjaminan Bank Garansi yang Dilakukan Oleh Pihak Bank	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi penelitian	57

DAFTAR PUSTAKA	60
----------------------	----





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Lutfiah Intang Suliati

NIM : 10400114391

Judul Skripsi : Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana gambaran umum bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah (Studi Pada Kantor Bank BRI Cabang Somba Opu) ? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Sejauh manakah tanggung jawab bank garansi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya? 2) Bagaimanakah Proses Pemenuhan Kewajiban Bank Garansi Jika Nasabah Bank tidak Mampu Memenuhi Kewajibannya?

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kepala SDM Bank BRI Somba Opu Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data atau informasi yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif yaitu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan perjanjian ini di ajukan beberapa kredit biasa setelah itu agungannya disimpan berupa uang tunai sebesar jumlah yang di tentukan lalu di terbitkan. Biasanya di terbitkan dalam harian, bulanan sampai selesai pekerjaan bank garansi, setelah itu blokir sebelumnya di buka kembali dan uang akan di kembalikan namun jika belum selesai maka blokirnya akan di tetapkan. Adapun di berikan surat kuasa jika nasabah melakukan wanprestasi untuk membayar blokirnya dan di berikan kepada borghoutnya. tetapi jika surat peringatan pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya barulah yang agungannya di lelang.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1).PT Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar, untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi dalam pemberian kredit dengan jaminan sebaiknya pihak bank tetap harus melakukan penilaian dengan seksama kepada calon debitur. 2).Hendaknya dalam penggunaan pinjaman kredit agar menghindari kebutuhan pribadi yang mempengaruhi pengembalian pinjaman.

Kata Kunci: Bank Garansi, Claim, Nasabah, Wanprestasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan atau badan hukum, sangat diperlukan biaya pembangunan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya berbagai sumber pembiayaan yang disediakan dunia perbankan bagi nasabahnya meliputi juga penyediaan jasa-jasa perbankan seperti Bank Garansi.¹

Lembaga Keuangan baik bank dan non bank dalam melakukan kegiatannya meningkatkan profit selalu mencari bentuk-bentuk bisnis baru sesuai koridor hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang. Salah satu bidang yang juga dilakukan dalam bisnis perbankan dan asuransi (khususnya asuransi kerugian) adalah salah satu bentuk penjaminan, baik jaminan hutang ataupun jaminan pelaksanaan kewajiban terhadap pihak ketiga. Seorang pelaku usaha dalam melakukan kegiatan tidak lain terlepas dari kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu alat yang sangat penting

¹Denish Davied Dariwu, “*Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832*”, *Lex Crimen* Vol. V, No. 7, Edisi September 2016.

dalam aktivitas bisnisnya. Dengan terbangunnya kepercayaan pada mitra kontraknya, akan membuat pemilik modal berani meminjamkan atau menginvestasikan dananya kepada mitra bisnisnya, ataupun pemilik proyek akan berani mempercayakan programnya untuk dikerjakan oleh kontraktor yang dipercayainya mampu untuk mengerjakan pembangunan proyek tersebut, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian antara mereka.²

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama yang dirasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mempunyai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*believe and prudent*).³

²Ade Hari Siswanto, “ *Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi*”, Lex Jurnalica Vol. 14 No. 1, Edisi April 2017.

³Muttatoh Hirin, “ *Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional)*”, Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No. 2, Edisi Juli - Desember 2014.

Dalam prakteknya, kepercayaan saja belum cukup untuk memastikan ataupun menghilangkan kemungkinan resiko ketidakmampuan mitra bisnisnya yang dipercaya untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Dalam upaya meminimalisasi resiko gagalnya perwujudan prestasi dari kepercayaan tersebut pada umumnya pihak pemilik dana atau pemilik proyek akan membutuhkan jaminan (dapat berbentuk jaminan kegandaan, jaminan perorangan ataupun perjanjian garansi yang diyakini akan dapat mengatasi potensi kerugian yang dialaminya apabila kepercayaan yang diberikan tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak tersebut.⁴

Di dalam praktek perjanjian, para pihak terutama kreditur (yang berhak menuntut prestasi) lebih memilih penggunaan bank garansi sebagai jaminan daripada jaminan kebendaan, hal ini dikarenakan bank garansi memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jaminan kebendaan pada umumnya, dengan kata lain penggunaan bank garansi sebagai suatu lembaga jaminan, dianggap cukup efektif dan efisien dalam membantu memperlancar lalu lintas hukum khususnya dalam transaksi perdagangan, industri dan jasa bagi para anggota masyarakat. Selain itu bank garansi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan usaha perbankan dalam bidang perkreditan.

Dalam pengamatan penggunaan bank garansi dewasa ini, telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yaitu dalam suatu aktivitas bisnis, dimana masalah

⁴Ade Hari Siswanto, “ *Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi*”, Lex Jurnalica Vol. 14 No. 1, Edisi April 2017.

pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikutsertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi. Bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang (*Borghtocht, Guarante*).⁵

Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh Pasal 1820 KUHPerdata dirumuskan pengertian sebagai berikut :

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.⁶

⁵Muttatoh Hirin,” *Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional)*”, Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No. 2, Edisi Juli - Desember 2014.

⁶Wacana Intelektual *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, (Penerrbit: Wipress), h. 353.

Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (*service*) dan kredit/pinjaman (*loan*), dimana secara rinci tertuang dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998. Setiap bank mempunyai jenis dan bentuk usaha (produk) yang sama akan tetapi berbeda dalam karakteristiknya tergantung sasaran yang ingin dicapainya. Proses globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di segala bidang terutama di bidang perdagangan, industri dan jasa.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga Perbankan, ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sehingga lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan. Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat Lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.⁷

⁷Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam bank garansi telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam memberikan jasa layanan. Dimana dalam melakukan transaksi bank wajib memberikan pembayaran atau peminjaman kepada nasabah. Penelitian ini menitikberatkan pengkajian dan pembahasan menyangkut proses pemenuhan dan penyelesaian Bank Garansi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Somba Opu jika nasabah wanprestasi.

1. Tanggung Jawab Bank Garansi Jika Nasabah tidak Memenuhi Kewajibannya.
2. Proses Pemenuhan Kewajiban Bank Garansi Jika Nasabah Bank tidak Mampu Memenuhi Kewajibannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada penjelasan diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bank garansi sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh nasabah? Selanjutnya pokok permasalahan dalam penelitian ini dijabarkan dalam sub bab sebagai berikut:

1. Sejauh Manakah Tanggung Jawab Bank Garansi Jika Nasabah tidak Memenuhi Kewajibannya?
2. Bagaimanakah Proses Pemenuhan Kewajiban Bank Garansi Jika Nasabah Bank tidak Mampu Memenuhi Kewajibannya?

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

Wira Muhammad Arif dalam buku tersebut memuat "Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbedaan dari referensi sebelumnya menjelaskan tentang:

1. mengenai Bank garansi (*borgtocht*) jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan, sesuai yang telah Diperjanjikan. Perbedaan referensi sebelumnya.
2. mengenai tentang Bank garansi yang jelas sesuai dengan judul Perbedaan dari referensi yang memuat hak-hak dalam melakukan transaksi kepada nasabah tidak efektif.⁸

⁸Wira Muhammad Arif, *Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi wanprestasi oleh Nasabah*, Skripsi (Universitas Sumatera Utara Medan: Hukum, 2010), h. 35.

Nindyo Pramono dalam buku tersebut memuat penjelasan tentang Proses penyelesaian wanprestasi tidak terlepas dari berbagai masalah.

1. Terjadinya wanprestasi baik wanprestasi dari pihak bank, pihak pemberi jaminan (nasabah bank), maupun pihak penerima jaminan.
2. Pihak Bank adalah pihak yang bertindak sebagai debitur yaitu yang memberi Bank Garansi kepada pihak nasabah, sedangkan yang bertindak sebagai pihak penerima jaminan atau terjamin adalah pihak kontraktor.

Perbedaan dari referensi sebelumnya .

1. dikaitkan dengan judul dalam penelitian ini wanprestasi dimaksud ditujukan kepada nasabah sebagai kreditur bukan pihak Bank sebagai debitur, yaitu nasabah tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa
2. Dalam isinya beberapa perbedaan dari buku lain karena tidak terdapat penjelasan mengenai pengalihan kewajiban.⁹

Penulis oleh Subekti, Tjitrorosubyo dalam buku yang berjudul dasar hukum pemberian Bank Garansi yang dimana perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUHPerdato Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi.

Perbedaan dari referensi sebelumnya ini

terdapat penjelasan mengenai poin dasar dalam kitab undang-undang perdata yang menjelaskan mengenai dasar-dasar bank garansi.¹⁰

⁹Nindyo Pramono., *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003) h. 221

Penulis Handri Raharjo dalam buku yang berjudul hukum perjanjian di Indonesia dalam buku ini memuat dalam melakukan wanprestasi ada tiga unsur yang memenuhi kesalahan; yang pertama, perbuatan yang dilakukan debitur disesalkan kreditur. Kedua, Debitur dapat menduga akibatnya, di bagi menjadi 2 akibat yaitu, objek sebagai manusia normal, kedua adalah subyek sebagai seorang ahli. Dan ketiga Debitur dalam keadaan cakap.

Perbedaan referensi sebelumnya.

Penentuannya sangat berkaitan dengan macam prestasinya yaitu: pertama, berbuat sesuatu, yang berarti debitur memberikan sesuatu tetapi terlambat memenuhi sesuatu sehingga sesuatu itu tidak berguna dan tidak memenuhi prestasi. Kedua, tidak berbuat sesuatu, yang artinya pihak A yang di berikan kepercayaan namun tidak memenuhi sesuatu itu dan akhirnya terjadilah cacat prestasi. Yang ketiga, memberi atau menyerahkan sesuatu, artinya si A wajib menyerahkan barang namun pihak A tidak memberikan atau terlambat dalam melakukan sesuatu dan menyebabkan tidak berguna atau cacat tidak pantas memenuhi perjanjian. Yang membedakan dalam isi buku ini yaitu beberapa contoh atau gambaran kasus yang dijelaskan ketika terjadinya cacat prestasi kepada pihak yang sedang melakukan proses transaksi.¹¹

Penulis dalam buku ini Daeng Naja, buku yang berjudul Hukum kredit dan bank garansi yang memuat Dalam kegiatan pelayanan jasa berupa penerbitan garansi.

¹⁰Subekti., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) h.323

¹¹Raharjo, Handri., *Hukum Perjanjian di Indonesia*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) h.79

Perbedaan dari referensi sebelumnya

1. proses penerbitan yang akan menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa provisi (keuntungan berupa *fee*). Di samping pembebanan provisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian Bank Garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan sebagaimana juga yang berlaku dalam pemberian kredit.
2. adanya syarat-syarat pemberian dan ketentuan-ketentuan di dalam proses bank garansi, dan pedoman yang dimiliki.¹²

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sejauh manakah tanggung jawab bank garansi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses pemenuhan kewajiban bank garansi jika nasabah bank tidak mampu memenuhi kewajibannya

F. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman tentang Sejauh manakah tanggung jawab bank garansi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya.
2. Memberikan pemahaman mengenai Bagaimanakah proses pemenuhan kewajiban bank garansi jika nasabah bank tidak mampu memenuhi kewajibannya.

¹²HR. Daeng Naja., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 89.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Bank Garansi*

Istilah garansi berarti jaminan, dan menggaransi berarti menjamin. Jadi, bank garansi berarti suatu jaminan yang diberikan oleh bank. Adapun mengenai kata garansi berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *garantie* yang berarti jaminan.¹

Istilah garansi dalam bahasa Inggris disebut dengan *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Menurut pengertian di sini bahwa Bank garansi adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (*wan prestasi*) kepada pihak yang menerima jaminan. Dengan kata lain, bahwa Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan atau *borgtocht* dimana Bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur.²

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*biasanya nasabah bank penerbit dan disebut Applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji

¹Thomas Suyatno., hal. 59.

²<http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html>, diakses terakhir tanggal 28 Februari 2010.

(Wanprestasi). Jadi artinya bank menjamin nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati. Di dalam hal Bank mengeluarkan garansi bank artinya Bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya Bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (*Beneficiary*) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (*Beneficiary*).

Dalam artikel Sahabat Konsumen Bank Indonesia, Bank Garansi didefinisikan adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.³

Bank Indonesia sebagai bank sentral, oleh undang-undang diakui kedudukannya secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI). Begitu juga halnya dengan independensi Bank Indonesia secara tegas diakui oleh UUBI. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, menyatakan:

Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang.⁴

³Sahabat Konsumen Bank Indonesia., "Menenal Bank Garansi", Artikel Bank Indonesia Disebarkan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.

⁴Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 huruf D.

UUBI mengakui pula kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum dan Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akan tetapi menurut Bagir Manan, Bank Indonesia sebagai badan hukum menjadi ganjil kalau dihubungkan dengan Bank Indonesia sebagai lembaga negara.

Sebagai lembaga negara, Bank Indonesia adalah organ penyelenggara organisasi negara. Negaralah yang merupakan badan hukum bukan organnya.⁵

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, bank-bank nasional yang ada, baik bank umum maupun swasta, tunduk dan patuh pada segala peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), ditentukan mengenai usaha bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

⁵Bagir Manan., *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, (Jakarta: Monograph, 2000), h. 8.

- a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Dihapus;
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf (n) UU Perbankan ditentukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 6 UU Perbankan, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan pelayanan seperti jaminan bank atau disebut sebagai bank garansi.

Kegiatan lain yang lazim tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Usaha lain ini diantaranya, berupa Bank Garansi (BG), bertindak sebagai bank persepsi, *swap* bunga, membantu administrasi nasabah dan lain-lain.

Bank garansi dipandang dari aspek hukumnya disebut *borgtocht*. Bank garansi sudah lama dikenal sebagai lembaga penjaminan atas hutang atau kewajiban

⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 6

debitur (nasabah) kepada penerima jaminan (pihak ketiga), dimana tentunya prinsip-prinsip perbankan dan kehati-hatian diterapkan dalam menganalisa permohonan bank garansi oleh debitur.

Pasal 1 angka 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank menyebutkan:

Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).⁷

Untuk lebih memudahkan dalam memahami siapa saja yang terlibat di dalam sebuah bank garansi ini, maka sebenarnya dalam bank garansi itu sendiri, ada 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. Pihak penjamin yaitu pihak yang memberikan jaminan (pihak bank);
2. Pihak terjamin yaitu pihak yang dijamin (nasabah atau debitur); dan
3. Pihak penerima jaminan yaitu pihak yang menerima jaminan (pihak ketiga).

Sehubungan dengan itu, Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum (milik pemerintah) dalam upaya meningkatkan profitabilitas melalui ekspansi kredit secara sehat, dan untuk mencapai struktur pendapatan Bank Rakyat Indonesia yang sehat sebagai bank komersial. Maka, salah satu sarana yang digunakannya dalam meningkatkan profitabilitas tersebut adalah melakukan kegiatan pelayanan bank garansi.

⁷Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB, Pasal 1 angka 1

Bank garansi merupakan suatu pengakuan tertulis yang dikeluarkan oleh bank tertentu dimana bank tertentu tersebut menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan (pihak ketiga atau terjamin) untuk menggantikan kedudukan penerima jaminan atau untuk memenuhi kewajiban penerima jaminan jika penerima jaminan tidak memenuhi kewajibannya atau cedera janji kepada bank sebagai pemberi jaminan tersebut. Selengkapnya mengenai bank garansi lebih jelasnya dapat dipahami berikut ini:

Bank garansi (*borgtocht*) adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan, sesuai yang telah diperjanjikan.⁸

Menjamin dalam arti bahwa bank sebagai pemberi jaminan akan memenuhi kewajiban sesuatu hal tertentu, jika yang dijamin tidak melaksanakan kewajibannya. Bank garansi ini diberikan kepada nasabah yang akan melakukan suatu usaha yang tidak membutuhkan kredit dari bank, tetapi dalam bentuk jaminan dari bank. Bank garansi dalam hal ini diperlukan guna melayani kebutuhan nasabah (masyarakat) antara lain dalam usaha pembelian, usaha dalam bidang ekspor dan impor, jaminan dalam pelaksanaan proyek properti seperti bagi pengusaha *real estate*.

⁸Tjiptoadinugroho., *Perbankan Masalah Perkreditan*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994), h. 168.

Bank garansi juga disebut sebagai kredit sindikasi atau *Syndicated Loan* karena memiliki kesamaan dalam hal sama-sama bertujuan untuk membiayai suatu proyek yang membutuhkan modal yang cukup besar.

Tepatlah yang dikatakan Iswahjudi A. Karim, bahwa:

Kredit sindikasi ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.⁹

Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung, diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembangunan atau proyek tertentu kepada kreditur (bank) manakala debitur (nasabah) wanprestasi.

Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka bank sebagai penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan Pasal 1831 KUHPerdara atau Pasal 1832 KUHPerdara. Pasal 1831 KUHPerdara, dinyatakan bahwa:

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.¹⁰

⁹Iswahjudi A. Karim., *Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Karimsyah Law Firm, 2005), h. 2.

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1831

Sedangkan Pasal 1832 KUHPerdata brtbunyi:

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.¹¹

Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan Pasal 1831 KUHPerdata, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu.

Sedangkan jika menggunakan Pasal 1832 KUHPerdata, bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Dalam bank garansi, pihak bank atau kreditur atau pemberi jaminan wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam bank garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan dan begitu pula pihak terjamin atau nasabah atau kreditur wajib mematuhi dengan cara mengikatkan diri kepada perjanjian di dalam bank garansi yang telah disepakati terlebih dahulu.

Dengan memberikan bank garansi berarti bank telah membuat pengakuan atau janji secara tertulis kepada penerima jaminan atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, resiko yang dihadapi oleh penerima atau pihak ketiga tersebut diambil alih oleh bank (pemberi jaminan). Sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil alih resiko tersebut, bank sebagai pemberi jaminan itu harus

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1832

mendapatkan (*fee*) dan meminta kontra garansi dari nasabah (sebagai pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis.

Pengertian Bank Garansi atau Garansi Bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia SE BI No. 23/7/UKU tanggal 18-03-1991 adalah sebagai berikut :

1. Warkat yang diterbitkan bank yang menyebabkan kewajiban membayar apabila terjadi wanprestasi.
2. Penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank bila terjadi wanprestasi.
3. Perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Bank adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memiliki peran dan fungsi penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian disetiap aktivitas yang dijalankannya.

1. Kasus Bank Garansi Palsu Rp 700 Milliar, Yang Belum Dieksekusi

Memblenya penegakan hukum kembali terjadi. Dua terpidana asal Kota Surabaya, pasangan suami-istri Tjandra Limanjaya dan Irnawati Susanto, warga

Perumahan Galaxy Bumi Permai D1/8 Surabaya, hingga kini belum dieksekusi pasca-keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pid/2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang sebelumnya membebaskan keduanya.

Dalam amar putusan tertanggal 24 November 2014 yang dibacakan ketua majelis hakim Dr Artidjo Alkostar SH LLM, diperintahkan agar pasutri itu ditahan selama 7 tahun dan membayar denda Rp 3 miliar.

Jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama setahun. Keduanya oleh MA dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang senilai USD 55 juta (setara Rp 770 miliar).

Putusan MA ini membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2012. Putusan tingkat pertama tersebut sebelumnya membebaskan keduanya dari pelanggaran pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dan pasal 3 ayat 1a UU Nomor 23 Tahun 2003.

Eksekusi keduanya ternyata belum berjalan, meski putusan itu sudah dibacakan MA pada 24 November 2014. Bahkan, pemberitahuan adanya putusan itu baru terungkap awal Juli 2015 saat panitera PN Surabaya memberitahu isi putusan kepada kedua terdakwa di rumahnya.

Kasus yang melibatkan Tjandra dan istrinya Irnawati itu terkait megaprojek pembangunan mesin pembangkit listrik PLTU di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, yang melibatkan bank kelas internasional asal Amerika Morgan Stanley Bank dan bank garansi palsu seolah-olah diterbitkan Bank Mandiri senilai USD 55 juta.

Kasus ini bermula saat 2007, ketika Tjandra selaku pemilik Lee Man Investment Co Ltd dan juga direktur PT General Energi Bali (GEB) butuh dana besar untuk membiayai proyek PLTU di Celukan Bawang. Sebab, PT GEB memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada 21 Maret 2007.

Melalui penasihat keuangan dari Landon Partner di Shanghai, Tiongkok, Tjandra menemui wakil Morgan Stanley di Hong Kong, guna mencari pembiayaan. Pada 11 Juni 2007, Tjandra dan istrinya mendatangi lagi kantor Morgan Stanley. Tjandra menyebutkan pinjamannya akan dijamin dengan bank garansi yang diterbitkan Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pihak Mandiri.

Tjandra juga sempat menunjukkan adanya dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak Electric Power Construction (EPC) antara PT GEB dengan perusahaan CMEC Tiongkok dalam rangka pembelian mesin/peralatan. Morgan Stanley pun tertarik dan bersedia memberikan pinjaman.

Syarat bank garansi yang diminta Morgan Stanley dipenuhi Tjandra. Yaitu, Bank Garansi Nomor: MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 yang diterbitkan Bank Mandiri senilai USD 50 juta dikirim melalui pos ke kantor Morgan Stanley Bank di London.

Saat pihak Morgan Stanley meminta pesan *swift* dari Bank Mandiri untuk garansi bank tahun 2007 itu, Tjandra dan Irnawati (istrinya) memberi jaminan bahwa ia menyaksikan sendiri ketika Bank Mandiri mengirim pesan *swift* tersebut.

Selanjutnya pada 12 September 2007, pinjaman keduanya dicairkan dan dikirim Morgan Stanley ke rekening Nomor: 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sejumlah USD 46.555.000, dan pada hari yang sama Tjandra mentransfer seluruhnya ke rekening PT GEB.

Satu bulan sebelum jatuh tempo perjanjian 1 September 2008, Tjandra melalui London Partners menghubungi Morgan Stanley via telepon dan email. Intinya meminta perpanjangan perjanjian setahun berikutnya dan disetujui Morgan Stanley.

Setelah menerima bank garansi bernomor MBG7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai US\$ 55 juta, Morgan Stanley pada 2 September 2008 kembali mentransfer dana sebesar USD 519.450 ke rekening Nomor: 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank, dan pada hari itu juga oleh Tjandra ditransfer ke rekening pribadinya.

Sekitar Agustus 2009 dan mendekati jatuh tempo, Morgan Stanley mengirimkan faksimile ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta untuk memberitahu bahwa Morgan Stanley Bank International LTD akan mencairkan bank garansi 2008 dan meminta kerja sama agar proses berjalan lancar.

Bank Mandiri memberi balasan bahwa bank garansi Nomor: MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai US\$ 55 juta tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat di Bank Mandiri alias palsu.

Baik Tjandra maupun Irnawati kini masuk DPO. “Ada surat dari PN Jakarta Pusat tentang isi putusan. Sebab menyangkut warga Surabaya, maka PN Surabaya yang melanjutkan dan memberitahukan isi putusan tersebut. Tugas kami hanya menyampaikan,” ujar seorang panitera di PN Surabaya.¹²



¹²Pro kaltim, Kasus bank garansi palsu 700 miliar rupiah yang belum dieksekusi <http://kaltim.prokal.co/read/news/241941-kasus-bank-garansi-palsu-rp-770-miliar-pelaku-belum-dieksekusi>, diakses pada Kamis, 27 Agustus 2015

B. Hak dan Kewajiban

1. Hak dalam Proses Perjanjian

Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini diperoleh serta dibawanya sejak dalam kandungan sampai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sifat kemanusiannya, hak ini tidak dapat dicabut atau dirampas oleh siapapun, sebab apabila dicabut atau dirampas akan hilang sifat kemanusiannya.

Disamping hak asasi adapula kewajiban asasi, dalam pelaksanaan secara logis harus dijalankan kewajiban setelah itu baru menuntut hak. Hak asasi tidak dapat dituntut secara mutlak, karena kemutlakan berarti melanggar hak asasi orang lain.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Apabila di dalam hubungan perputangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminakan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

2. Kewajiban Dalam Proses Perjanjian

Para pihak yang mengadakan perjanjian disebut kreditur dan debitur, dalam hal ini, kreditur berhak atas prestasi dan debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang, kewajiban debitur tersebut

dapat pula disebut dengan schuld. Disamping schuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur dengan menggunakan harta kekayaan guna membayar utang tersebut.

Dari beberapa diuraikan di atas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, maka perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli ini biasanya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual.

Menurut Subekti, penjual mempunyai dua kewajiban pokok yaitu, pertama menyerahkan barangnya serta mungkin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan tentram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat yang tersembunyi, kemudian kewajiban pembeli adalah untuk membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1480 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa jika penyerahan karena kelalaian penjual tidak dapat dilaksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1266 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*, apabila barang tersebut sudah diserahkan, maka pembeli dapat menuntut penjual untuk bertanggung jawab

jika ada pihak lain yang membantah hak milik penjual atas barang, yang telah dibeli oleh pembeli atau jika ternyata pada barang tersebut terdapat cacat tersembunyi.

Dalam penerbitan Bank Garansi tidak terlepas dari berbagai masalah. Misalnya terjadinya wanprestasi baik wanprestasi dari pihak bank, pihak pemberi jaminan (nasabah bank), maupun pihak penerima jaminan. Pihak Bank adalah pihak yang bertindak sebagai debitur yaitu yang memberi Bank Garansi kepada pihak debitur untuk melakukan transaksi berupa jaminan.

Dalam kegiatan pelayanan jasa berupa penerbitan garansi, maka bank penerbit akan menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa provisi (keuntungan berupa *fee*). Di samping pembebanan provisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian Bank Garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan sebagaimana juga yang berlaku dalam pemberian kredit.

Jika suatu bank bersedia untuk menerbitkan suatu bank garansi berarti bank menjamin (menggaransi) untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi tertentu apabila pihak terjamin dikemudian hari tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Ditinjau dari segi hukum, pola hubungan tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perjanjian *borgtocht* atau perjanjian penangguhan. Perjanjian

penanggungan atau *borgtocht* pengaturannya dapat ditemukan pada KUHPerdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Substansi *borgtocht* atau perjanjian ini adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur berjanji dan mengikat diri akan memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri tidak mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Mengenai yang demikian ini pengaturannya terdapat pada Pasal 1820 KUHPerdata.

Dalam pemberian bank garansi, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan yang akan menggantikan kedudukan pihak yang lalai atau yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasinya menurut perjanjian kepada pihak penerima jaminan. Jadi, dalam hal ini bank yang mengikat diri untuk memenuhi kewajiban terjamin pada pihak ketiga atau pihak penerima jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Dengan demikian pada penerbitan suatu bank garansi terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:

- a. Pihak sebagai penjamin;
- b. Pihak nasabah sebagai terjamin; dan
- c. Pihak yang menerima jaminan.

Melihat dari sudut keterkaitan bank, bank garansi merupakan suatu pengakuan atau perjanjian tertulis dimana bank bersedia untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu

tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima Bank Garansi dalam pemberian garansi bank adalah:¹³

- a. Memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan cara menghubungi bank penerbit;
- b. Memeriksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek; dan,
- c. Memeriksa dan memahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan pihak penerima BG melakukan klaim apabila diperlukan.

Sedangkan bagi pihak yang dijamin Bank Garansi, hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Memperhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan Bank Garansi;
- b. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima jaminan sehingga tidak terjadi klaim atas Bank Garansi yang diterbitkan;
- c. Proses penerbitan Bank Garansi sama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga pihak yang dijamin perlu menjelaskan usaha tersebut secara terbuka kepada Bank.

¹³Sahabat Konsumen Bank Indonesia, hal. 2.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borghtoch*) yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam Pasal 1820-1850KUHPerdara.

Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam Pasal 1831-1838 KUHPerdara sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam Pasal 1839-1844 KUHPerdara.

Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penanggungan hutang) dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.

Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.

Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan *counter guarantee* yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan. Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitur dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

Dalam KUHPdata secara umum mengenal bentuk perjanjian semacam garansi bank atau Bank Garansi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata berlaku pula dalam perjanjian Bank Garansi. Tetapi mengenai bentuk dan syarat-syarat yang lebih rinci diserahkan kepada para pihak. Hanya saja karena Bank Garansi ini perjanjiannya sering dilakukan dan banyak digunakan, maka agar bank-bank memiliki pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) ditetapkan syarat-syarat pemberian Bank Garansi yang dalam penelitian ini dibahas pada sub bab selanjutnya.¹⁴

¹⁴HR. Daeng Naja., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 89.

Telah disebutkan terdahulu bahwa Bank Garansi merupakan bagian dari pemberian kredit yang juga merupakan salah satu bentuk fasilitas usaha yang diperbolehkan dikelola oleh bank-bank. Dalam pemberian garansi, di samping pemberian Bank Garansi, ada bentuk lain yang berhubungan dengan Bank Garansi ini yaitu:

1. Garansi yang berhubungan dengan surat berharga. Bentuk lain dari garansi yang diterbitkan bank dapat berbentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Menurut ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR pemberian Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh bank dan berakhir apabila:
 - a. Telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima;
 - b. Tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan,
 - c. Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUHPerdara telah kadaluarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

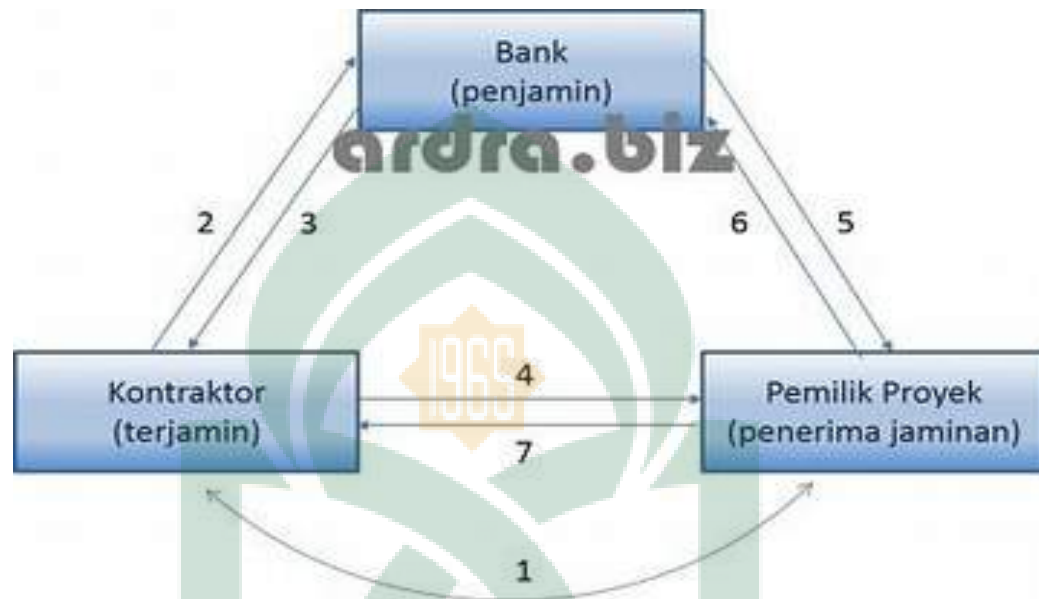
2. Garansi yang berhubungan dengan perjanjian bersyarat. Bentuk lain dari garansi yang diterbitkan oleh bank dapat berbentuk garansi lainnya yang karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Adapun konkritnya dapat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin tersebut cidera janji (wanprestasi) atau berupa *Letter of Credit* (L/C). Penerbitan L/C tunduk pada ketentuan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCP). Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR, pemberian garansi ini berlaku sejak saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian.¹⁵

Mekanisme Proses Pembuatan Perjanjian kontrak Bank Garansi melibatkan tiga pihak yaitu, Penjamin, terjamin dan penerima jaminan.

1. Penjamin adalah bank yang menerbitkan jaminan bank kepada nasabahnya.
2. Terjamin adalah nasabah (kontraktor) sebagai pihak yang dijamin, nasabah yang melakukan permohonan kepada bank untuk menerbitkan jaminan bank atas dari nasabah tersebut.
3. Penerima jaminan adalah pihak ketiga (pemilik proyek) yang menerima jaminan atas suatu perjanjian dengan pihak terjamin atau pihak yang menerima jaminan

¹⁵Wira Muhammad Arif, *Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi wanprestasi oleh Nasabah*, Skripsi (Universitas Sumatera Utara Medan: Hukum, 2010), h. 35.

atas suatu konsekuensi kesalahan (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak terjamin dan berhak untuk memperoleh penggantian atas kejadian tersebut.



Proses terjadinya Hubungan antara penjamin, terjamin dan penerima jaminan adalah sebagai berikut:

1. Perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek.
2. Kontraktor mengajukan bank garansi pada suatu bank dengan membayar provisi atau komisi.
3. Bank memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor.
4. Sertifikat diberikan kepada pemilik proyek pada saat pemilik proyek memberikan proyek kepada kontraktor.

5. Ketika kontraktor cedera janji atau gagal menepati janji maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi pada bank yang mengeluarkan sertifikat.
6. Bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek.
7. Ketika pekerjaan dan proyek dapat di selesaikan oleh kontraktor maka sertifikat bank garansi harus di kembalikan.

Agar bank dapat menerbitkan bank garansi, maka pihak terjamin/nasabah harus memiliki simpanan pada bank penjamin. Simpanan tersebut dapat berupa deposito atau dalam bentuk simpanan giro setidaknya sama dengan jumlah uang yang di tetapkan sebagai jaminan, yang gunanya sebagai jaminan lawan atas bank garansi yang akan di terbitkan.

C. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat di putar oleh bank yang nantinya di salurkan kembali kepada masyarakat yang membuuhkan bantuan bank.

Menurut Djasalim Saladin dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank” menyatakan bahwa “Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”. (Saladin, 1994).

Komaruddin dalam “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”. (Komaruddin, 1994).

Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa “Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank”.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum oleh Bank kepada Nasabah

Perlindungan hukum yang di berikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika di lihat berdasarkan UU NO.10 Tahun 1998 atas:

- a. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah, yang di maksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.
- b. Rahasia bank yang di maksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan di salahgunakan.
- c. Di bentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang di simpn dalam bank bersangkutan.

Selain itu. Usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat di temukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian dalam pemberian Bank Garansi dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian pemeberian Bank Garansi tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi nasabah atau kreditur dalam perjanjian pemberian Bank garansi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan kreditur atau nasabah yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi kreditur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. kreditur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa debitur tidak berprestasi (prestasi buruk atau tidak melaksanakan kewajibannya) dan karenanya debitur tersebut dapat dipersalahkan. Sehubungan dengan itu, ada 3 (tiga) unsur yang memenuhi kesalahan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur. Contohnya: Hari itu panas, si A mengirimkan es ke tempat si B, hal ini menyebabkan esnya mencair sebelum sampai tujuan;
2. Debitur dapat menduga akibatnya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;
 - a. Objek sebagai manusia normal; dan
 - b. Subyek sebagai seorang ahli
3. Debitur dalam keadaan cakap berbuat. Sejak kapan dikatakan debitur dapat melakukan wanprestasi? Penentuannya sangat berkaitan dengan macam prestasinya, yaitu;
 - a. Berbuat sesuatu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1241 KUHPerdara.

Contohnya; Si A tersebut tidak berbuat sesuatu atau terlambat memenuhi

sesuatu yang menyebabkan tidak berguna atau bisa juga si A keliru (tidak pantas) dalam memenuhi perjanjian;

- b. tidak berbuat sesuatu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1240 KUHPerdata. Contohnya; Seorang koki restoran wajib menjaga resep masakan tetapi si koki itu berbuat sesuatu dengan membocorkan resep masakan restoran tersebut kepada pihak lain.
- c. Memberi atau menyerahkan sesuatu. Contohnya; Si A wajib menyerahkan barang tetapi si A tidak memberi atau terlambat memenuhi sesuatu yang menyebabkan tidak berguna atau bisa juga si A keliru (tidak pantas) memenuhi perjanjian.¹⁶



¹⁶Handri Raharjo., *Hukum Perjanjian di Indonesia*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu penelitian yang berkaitan tentang pertimbangan Prosedur dalam pemenuhan kewajiban bank garansi yang tidak sampai dalam kesanggupan nasabah untuk memenuhi kewajibannya di dalam Bank BRI cabang Somba Opu alasan penulis memilih instansi tersebut karena salah satu lembaga dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis terhadap bank garansi sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh nasabah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Sombaopu Makassar guna menemukan persoalan terkait Bank Garansi sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh nasabah. Dan tanggung jawab bank garansi jika nasabah tidak memenuhi tanggung jawabnya serta pemenuhan dalam kewajiban bank garansi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 45 hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan yang menetapkan waktu penelitian pada tanggal 15 oktober s/d 15 November 2018.

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

D. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank garansi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis tentang Bantuan Hukum dalam bentuk buku, makalah, wawancara dan artikel.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

E. *Tekhnik Pengumpulan Data*

Data berupa data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dll. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.

1. Studi pustaka

yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Jika diperlukan wawancara akan dilakukan untuk menambah data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan studi pustaka (*Documentary research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan melalui media internet. Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan secara langsung untuk mendukung dan memperkuat argumentasi-argumentasi yang dibahas dalam penelitian ini melalui wawancara kepada narasumber diantaranya pada Kepala SDM Bank BRI.

2. Wawancara

Menurut Emzir Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹ Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media

¹Angga Nugroho, Teknik Pengumpulan Data, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses 1 juli 2017.

telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pemilihan narasumber dilakukan dengan mengutamakan segi kompetensi keilmuan ataupun ketokohan seseorang yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen atau alat yang digunakan penulis dalam memperoleh data hukum yang dimuat dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Buku dan pulpen yang digunakan sebagai intrumen untuk mencatat poin-poin penting dalam pencarian data informasi yang ditulis kertas.
2. *Flash disk* yang digunakan untuk mentrasfer atau menyimpan file untuk keperluan data penelitan.
3. Alat rekam berupa *smartphone* yang dijadikan sebagai alat untuk menyimpan informasi berupa suara ketika melakukan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Data di analisis secara kualitatif dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yuridis adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan dengan data kenyataan dilapangan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dilapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, Normatif Logis, dan sistematis dengan Menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif. Artinya, data yang diperoleh sesuai yang ada dilapangan digambarkan sesuai kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang digambarkan untuk menganalisis data adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan permasalahan logis yang artinya dalam melakukan analisis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Somba Opu Makassar*

1. Sejarah Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah salah satu bank milik pemerintah di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmaradja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 tentang Status Bank Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi BRI

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

b. Misi BRI

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan di dukung oleh sumber daya manusia yang professional dan teknolohgi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

B. Kasus Bank Garansi

1. Kasus Bank Garansi Bodong Bank Mandiri Berakhir di BANI

Dalam putusannya, BANI menyatakan PT Setdco Intrinsic Nusantara terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Perusahaan investasi patungan itu akhirnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp26,09 miliar.

Niat Departemen Pekerjaan Umum (PU) untuk menggugat PT Bank Mandiri Tbk kendur. Soalnya, akhir bulan lalu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengabulkan permohonan sengketa Departemen PU terhadap PT Setdco Intrinsic Nusantara (Setdco), investor yang diputus kontraknya oleh Departemen PU untuk membangun ruas tol Pandaan-Malang sepanjang 35 kilometer. Dengan kemenangan ini, dipastikan Departemen PU, tidak akan menggugat Bank Mandiri yang mayoritas sahamnya juga dimiliki Pemerintah. Kecuali kalau Menkeu (Menteri Keuangan) belum puas terhadap putusan ini, ujar Tjindra Parma, Kepala Biro Hukum Departemen PU dalam wawancara khusus dengan *hukumonline*, Kamis (9/5) malam.

Sekedar mengingatkan, kasus bank garansi bodong terungkap setelah Departemen PU memutus kontrak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Setdco untuk ruas tol yang membutuhkan modal AS\$350 juta itu. Pemutusan kontrak tersebut disebabkan ketidakmampuan Setdco untuk memenuhi modal yang disyaratkan Departemen PU tadi. Masalah pun timbul. Ketika Departemen PU akan mencairkan surat garansi berkop Bank Mandiri yang diberikan Setdco diawal kontrak, ternyata surat garansi itu tak terdaftar di bank pelat merah

tersebut. Surat garansi itu bodong, tegas Mansyur S Nasution, *Senior Vice President Corporate Secretary* Bank Mandiri waktu itu.

Tjindra naik pitam mendengar jawaban Mansyur. Suka atau tidak suka, kata dia, Bank Mandiri harus mencairkan uang jaminan pelaksanaan (performance bond) yang nilainya Rp26,09 miliar tersebut. Pejabat Departemen PU itu pantas marah. Soalnya, jika diteliti surat garansi bodong itu mirip dengan yang asli. Apalagi, surat yang berkop Bank Mandiri Cabang Gambir itu, ditandatangani oleh Momon Suhilman, staf *general affair* Bank Mandiri dengan nomor karyawan M.275, pada 3 Juli 2006. Menurut pengakuan pihak Setdco, pihaknya menggunakan jasa *arranger* PT Amindo Investment Nusantara (Amindo) untuk mendapatkan bank garansi senilai Rp26,09 miliar dari Bank Mandiri. Jika, dana itu tidak bisa kembali, tentu saja departemen itu bakal terbelit masalah hukum. Apalagi kalau bukan dituduh merugikan keuangan negara.

Kedua institusi itu lantas mencari jalan keluar penyelesaian kasus tersebut. Bank Mandiri melaporkan Momon dan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan garansi bodong ke Polda Metro Jaya pada Juli 2007. Sementara Departemen PU memperkarakan Setdco ke BANI. Alasannya, dalam PPJT disebutkan, jika terjadi sengketa antara operator dengan regulator, maka diselesaikan lewat BANI. Nah, perkara di BANI itu lah yang kini sudah diputus.

Dalam putusan No. 08.358/VI/BANI/Ktd tanggal 21 April 2008, Majelis Arbiter menyatakan Setdco telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perusahaan patungan itu dianggap cidera janji terhadap Departemen PU terkait pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam PPJT. Untuk itu, Majelis menghukum Setdco untuk membayar ganti rugi kepada Departemen PU sebesar Rp2,6,09 miliar. Ganti rugi itu mesti dibayar paling lambat 30 hari setelah putusan dibacakan. Jika tidak, maka Setdco dihukum untuk membayar bunga sebesar 1%0 (satu mil) dari jumlah terhutang untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi.

Majelis Arbiter dalam putusannya juga memerintahkan kepada Departemen PU dan Setdco untuk membayar biaya perkara, masing-masing setengah dari total biaya perkara sebesar Rp603,4 juta. Biaya itu sebelumnya sudah dibayarkan penuh oleh Departemen PU. Sekedar informasi, putusan arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat kedua belah pihak. Untuk eksekusi, Majelis memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan yang dibacakan pada 24 April 2008 tersebut, pada Panitera Pengadilan Negeri (PN) Malang.

Punya hak istimewa

Perjalanan Setdco menjadi investor untuk ruas tol Pandaan-Malang juga unik. Ternyata perusahaan itu sudah jauh-jauh hari mengantongi PPJT dengan Departemen PU untuk proyek tersebut sejak 1995. Hanya, proyek itu gagal dilaksanakan ketika krisis moneter tahun 1997/1998 menimpa Negeri ini. Setelah krisis berlalu, Pemerintah berniat mengadakan kembali proyek tersebut. Lantaran masih terikat kontrak dengan Setdco, Departemen PU kembali menunjuk investor tersebut untuk pengadaan jalan tol yang rencananya akan digunakan sebagai jalur alternatif mudik

tersebut. Setdco mendapat hak keutamaan karena dia menang lelang tahun 1995 untuk ruas itu. Jadi, dia melanjutkan lelang zamannya Pak Harto, kata Tjindra.

Ketika Departemen PU melakukan evaluasi, ternyata saham Setdco telah dimiliki oleh sejumlah investor asing. Dengan kata lain, Setdco kini menjadi perusahaan patungan. Saham perusahaan itu dimiliki oleh PT Setdco Graha Nusantara (SGN) sebesar 35 persen, PT Intrinsic Resources Indonesia Mutu Andan (Intrinsic) sebesar 34 persen, dan Hwan Ho Construction Co.Ltd (HHC) sebesar 31 persen. Sumber hukumonline di Departemen PU membisikan, tidak mampunya Setdco untuk membiayai proyek itu dikarenakan perusahaan itu tidak mendapat pendanaan dari pihak mana pun termasuk bank.

Tjindra mengatakan dengan kejadian ini, ke depan pihaknya akan melakukan lelang baru terhadap proyek tersebut. Sayangnya, dia tidak mau memberitahukan kapan lelang akan dimulai. Itu urusannya BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), cetus Tjindra.

Hingga berita ini diturunkan *hukumonline* belum mendapat konfirmasi dari Setdco. Namun, dalam sidang arbitrase sebetulnya Setdco pernah mengajukan upaya damai. Salah satunya bersedia untuk mengembalikan dana Rp26,09 miliar tersebut, dengan syarat Setdco ditujuk kembali menjadi investor untuk proyek yang sama.

Terang saja tidak diterima Departemen PU. Masa mau jatuh ke lubang yang sama?
tanya Tjindra.¹

C. Tanggung Jawab Bank Garansi Jika Nasabah tidak Memenuhi Kewajibannya

Sejauh ini Transaksi pembayaran atau peminjaman dalam bank BRI belum ada nasabah yang melakukan wanprestasi atau klaim ataupun tidak mampu menyelesaikan kewajibannya itu belum ada. Dan semua nasabah menyelesaikan dan memenuhi transaksinya.

Namun dalam gambaran yang diberikan oleh Bank BRI Somba Opu Makassar. Jika ada yang melakukan seperti itu, itu tergantung. Contoh dalam kasus nasabah dalam waktu mengambil bank garansi menyimpan uang di bank, dan uang yang di ambil senilai 40 juta, sisa dari 40 juta itu di pakai untuk membayar dan di berikan kepada pihak ketiga (pemberi proyek). Bank garansi di berikan pun bukan sembarang orang. Maka dari itu dalam transaksi belum ada yang klaim, karena bank garansi pun di berikan oleh orang yang sudah di kenal atau sudah memiliki kredit di bank dan memiliki simpanan yang cukup besar. Dan jika ingin memberikan bank garansi, nasabah harus menyimpan uang terlebih dahulu.

¹Hukum online.com, Kasus Bank Garansi Bodong Bank Mandiri Berakhir di BANI, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19200/kasus-bank-garansi-bodong-bank-mandiri-berakhir-di-bani>, diakses pada Jumat, 09 Mei 2008

Dalam proses pembuatan perjanjian di ajukan dengan kredit biasa setelah itu agungannya disimpan berupa uang tunai sebesar 200 juta lalu di terbitkan. Biasanya dalam harian, bulanan sampai selesai pekerjaan bank garansi, setelah itu blokir sebelumnya di buka kembali dan uang akan di kembalikan namun jika belum selesai maka blokirnya tetap di tetapkan. Adapun di berikan surat kuasa jika nasabah melakukan wanprestasi untuk membayar blokirnya dan di berikan kepada *borghout*-nya. Namun sampai sejauh ini belum ada yang melakukan karena mereka melakukan dan menyelesaikan sebelum waktunya.

Proses ketika nasabah melakukan wanprestasi yang pertama di lakukan oleh Bank yaitu menagih, namun jika nasabah mengelak maka yang kedua di berikan surat peringatan tetapi jika surat peringatan pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya barulah yang agungannya di lelang.

Bank garansi bias jadi kredit biasa dan agungannya biasa berupa *case told*, rumah. Itu jika ada nasabah yang wanprestasi, nah itulah yang akan berubah menjadi kredit modal kerja, berupa sertifikat dan kredit biasa. Tetapi yang di lakukan di bank BRI Somba Opu Makassar biasanya di berikan dalam bentuk uang tunai jadi tidak ada resiko bagi bank karena uangnya sudah di simpan terlebih dahulu oleh bank itu sendiri. Jadi jika ada yang wanprestasi agungannya akan di debit atau dalam bentuk uang tunai.

D. Proses Penyelesaian Penjaminan Bank Garansi yang Dilakukan Oleh Pihak Bank

Tujuan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya adalah pemberian bank garansi, tidak hanya sebatas pada tahap pelaksanaan bantuan bank (khususnya bantuan keuangan) saja, tetapi masih ada juga aktivitas lainnya yang berupa pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan dengan kegiatan pembinaan. Hubungan antara bank dengan para debitur hendaknya dibina sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan serasi dan dinamis. Hubungan antara kedua belah pihak ini perlu dipupuk terus-menerus, sehingga bank selalu mengadakan *monitoring* terhadap para nasabahnya.

Jaminan dalam bank garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak *guarantor* atau pihak bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajiban, misalnya membayar hutang-hutangnya, maka pihak bank tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Sedangkan *counter guarantee* atau jaminan lawan yang cukup dikenal dalam perjanjian bank garansi. Yang dimaksud dengan *counter guarantee* atau jaminan lawan yang cukup adalah bahwa kontra jaminan yang dimintakan oleh bank dari pemohon bank garansi mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin dipikul oleh bank apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus benar-benar direalisasi atau dicairkan.

Penerbitan garansi yang dilakukan oleh bank, pihak bank selalu mensyaratkan adanya jaminan lawan atau *counter guaranty* yang mana nilainya itu ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi resiko yang terjadi dalam

penerbitan garansi bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank. Sifat jaminan lawan tersebut dapat berupa jaminan materi atau bukan materi, seperti jaminan kredit. Dalam hal jaminan lawan yang berupa materi, perlu diadakan penilaian dan pengikatan jaminan lawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai dengan tindakan-tindakan lainnya.

Dalam perjanjian pemberian bank garansi tersebut, tanggal mulai dan berakhirnya (jatuh tempo) suatu bank garansi selalu tercantum dalam warkat, bilyet, ataupun sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Dengan demikian, bank garansi berakhir apabila: Dikembalikannya bank garansi asli; Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi yang telah dilampaui tanpa adanya klaim dari pihak penerima bank garansi; Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang dijaminan oleh pihak bank melakukan wanprestasi, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin. Dalam kasus ini, harus diperhatikan mengenai klaim pembayaran jaminan bank yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi.

Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW. Dengan demikian, maka dari Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW tersebut telah jelas bahwa apabila pihak penerbit bank garansi atau *guarantor* terpaksa harus membayar ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan bank atau *bouwheer* harus dibuat terlebih dahulu akta subrogasi. Berdasarkan akta subrogasi yang telah dibuat sebelumnya, maka dari itu selanjutnya pihak bank yang menerbitkan bank garansi bersama-sama dengan pihak nasabah yang dijamin membuat akta perjanjian kredit. Hal ini dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan Pasal 1401 ayat 2 BW yang mengharuskan kedua bentuk perjanjian di atas dibuat dengan akta otentik.

Dalam pengajuan klaim yang akan dilakukan oleh pihak penerima bank garansi jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, dilakukan oleh *beneficiary* atau *bouwheer* atau penerima jaminan secara tertulis dengan melampirkan *Certificate of Default* yang menyatakan bahwa *applicant* atau nasabah bank telah wanprestasi sesuai dengan *underlying transactionnya* dan asli warkat bank garansi maupun dokumen-dokumen lain yang telah dipersyaratkan dalam bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penelitian dengan judul bank garansi sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi, maka dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses ketika nasabah melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank yaitu menagih, namun jika nasabah mengelak maka yang kedua diberikan surat peringatan tetapi jika surat peringatan pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya barulah yang agungannya di lelang.
2. Proses penyelesaian penjaminan bank garansi yang dilakukan oleh pihak bank Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Implikasi penelitian

1. PT Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar, untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi dalam pemberian kredit dengan jaminan sebaiknya pihak bank tetap harus melakukan penilaian dengan seksama kepada calon debitur dengan menerapkan prinsip 5 C's yang terdiri dari

penilaian watak, kemampuan, penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan dan penilaian terhadap prospek usaha debitur.

2. Kepada debitur, hendaknya dalam penggunaan pinjaman kredit agar menghindari kebutuhan konsumtif atau kebutuhan pribadi karena hal tersebut akan mempengaruhi pengembalian pinjaman kredit tersebut. Sebaiknya, pinjaman kredit tersebut lebih diutamakan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha dan pengembangan usaha yang nantinya laba dari usaha tersebut bisa digunakan untuk membayar dan mengembalikan pinjaman kedit kepada pihak bank.



WAWANCARA BERSAMA KEPALA SDM IBU YUKA BANK BRI SOMBA OPU MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

—————, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Djumaldi, F.X, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Karim, Iswahjudi A, *Kredit Sindikasi*, Jakarta: Karimsyah Law Firm, 2005.

Manan, Bagir, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, Jakarta: Monograph, 2000.

Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, 1999.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

—————, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Suyatno, Thomas., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994.

Skripsi:

Arif, Muhammad Wira, “Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah” Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum, 2010.

Pratiwi, Sherly, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum 2016”

Jurnal:

Dariwu, Denish Davied, “*Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832*”, *Lex Crimen* Vol. V, No. 7, Edisi September 2016.

Hirin, Muttatoh,” *Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank G aransi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional)*”, Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No. 2, Edisi Juli - Desember 2014.

Siswanto, Ade Hari, “ *Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi*”, *Lex Jurnalica* Vol. 14 No. 1, Edisi April 2017.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB,
Pasal 1 angka 1

Sahabat Konsumen Bank Indonesia., "Mengenal Bank Garansi", Artikel Bank Indonesia Disebarkan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.
Sahabat Konsumen Bank Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penelitian dengan judul bank garansi sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi, maka dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses ketika nasabah melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank yaitu menagih, namun jika nasabah mengelak maka yang kedua di berikan surat peringatan tetapi jika surat peringatan pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya barulah yang agungannya di lelang.
2. Proses penyelesaian penjaminan bank garansi yang dilakukan oleh pihak bank Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

B. Implikasi penelitian

1. PT Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar, untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi dalam pemberian kredit dengan jaminan sebaiknya pihak bank tetap harus melakukan penilaian dengan seksama kepada calon debitur dengan menerapkan prinsip 5 C's yang terdiri dari penilaian watak, kemampuan, penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan dan penilaian terhadap prospek usaha debitur.

2. Kepada debitur, hendaknya dalam penggunaan pinjaman kredit agar menghindari kebutuhan konsumtif atau kebutuhan pribadi karena hal tersebut akan mempengaruhi pengembalian pinjaman kredit tersebut. Sebaiknya, pinjaman kredit tersebut lebih diutamakan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha dan pengembangan usaha yang nantinya laba dari usaha tersebut bisa digunakan untuk membayar dan mengembalikan pinjaman kredit kepada pihak bank.



DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

—————, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Djumaldi, F.X, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Karim, Iswahjudi A, *Kredit Sindikasi*, Jakarta: Karimsyah Law Firm, 2005.

Manan, Bagir, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, Jakarta: Monograph, 2000.

Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, 1999.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

—————, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Suyatno, Thomas., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994.

Skripsi:

Arif, Muhammad Wira, “Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah” Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum, 2010.

Pratiwi, Sherly, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum 2016”

Jurnal:

Dariwu, Denish Davied, “*Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832*”, *Lex Crimen* Vol. V, No. 7, Edisi September 2016.

Hirin, Muttatoh,” *Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank G aransi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional)*”, Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No. 2, Edisi Juli - Desember 2014.

Siswanto, Ade Hari, “ *Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi*”, *Lex Jurnalica* Vol. 14 No. 1, Edisi April 2017.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB,
Pasal 1 angka 1

Sahabat Konsumen Bank Indonesia., "Mengenal Bank Garansi", Artikel Bank Indonesia Disebarkan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.
Sahabat Konsumen Bank Indonesia.

RIWAYAT HIDUP



LUTFIAH INTAN SULIATI, Kelahiran Sinjai, 15 November 1996, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Syamsul bahri SP.d dan ibu Rosmiati.

Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari SD 103 Bontompare Sinjai Utara tamat pada tahun 2008, dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di MTS Muhammadiyah Balangnipa Sinjai Utara tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan sekolah ke tingkat menengah atas di SMA Negeri 6 Sinjai Utara tamat pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata. Dan selesai pada tanggal 22 November 2018 (4 Tahun 2 Bulan 22 Hari).

Pengalaman Organisasi Independent Law Student (ILS) Periode 2016-2017, New Generation Club (NGC) Periode 2015-2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R